

LAPORAN KINERJA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 2025



GIACorpu



GIACorpu



Ringkasan Eksekutif Kinerja Pusdiklatwas Tahun 2025

Capaian Kinerja Utama



105,26%

Kompetensi SDM
Pengawasan

**Peningkatan
Kompetensi SDM APIP**

101,83%

**Hasil Evaluasi
"Baik"**

108,70%



108,30%

Tata Kelola
Pusdiklatwas

Skor ZI

107,12%

Skor SPIP

120,00%

Nilai IKPA

94,36%

Nilai PIPK

100,00%

Nilai SAKIP

120,00%

Hambatan/Kendala

Saskeg 3: Skor IKPA tidak tercapai.

Capaian skor IKPA belum optimal akibat ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran, pola belanja yang belum merata dengan konsentrasi pada triwulan IV, keterlambatan pertanggungjawaban UP/TUP, serta koordinasi antarunit yang belum efektif.

Kinerja Lainnya

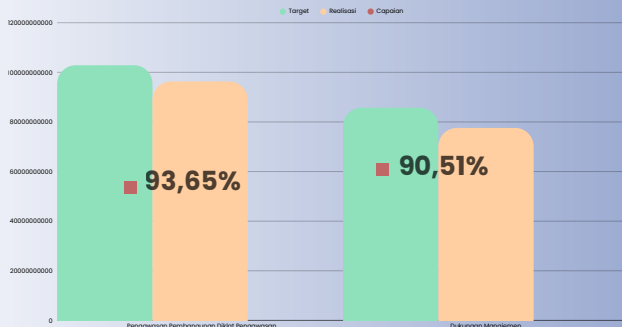
1. Kegiatan Utama yang mendukung kinerja tahun 2025

- Pada tahun 2025, Pusdiklatwas melakukan pembaruan dasar hukum GIA Corpu melalui berbagai tahapan koordinatif dan substantif yang akan dilanjutkan pada tahun 2026 hingga proses legislative drafting, harmonisasi, dan penetapan Peraturan BPKP yang ditargetkan selesai pada Triwulan I Tahun 2026.
- Realisasi PNPB sebesar Rp81,22 miliar atau 103,13 persen dari target, sebagai hasil kontribusi seluruh unit kerja BPKP dalam GIA Corpu.
- Pusdiklatwas BPKP mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 dan ISO 9001:2015 yang berlaku hingga 6 Agustus 2026.
- Pusdiklatwas BPKP melaksanakan peran operasional dan strategis sebagai Learning Office GIA Corpu dalam seluruh tahapan Learning Value Chain pada tahun 2025 melalui pelaksanaan berbagai *Learning Forum*.
- Pusdiklatwas BPKP telah menyelesaikan seluruh tahapan pengukuhan SKKNI Pengawasan Intern dan Manajemen Risiko dan saat ini menunggu penetapan Kementerian Ketenagakerjaan.
- Pusdiklatwas BPKP melakukan pemutakhiran tarif PNPB melalui PMK Nomor 57 Tahun 2024 serta menyusun usulan perubahan tarif pelatihan dan fasilitas pendukung sebagai dasar perubahan PP Nomor 80 Tahun 2021.

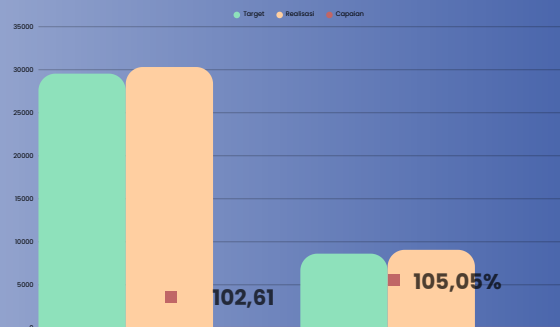
2. Penghargaan yang diterima tahun 2025

- Pusdiklatwas berkontribusi dalam perolehan penghargaan BPKP sebagai Corpu Berdampak kategori Kementerian/Lembaga dari Lembaga Administrasi Negara RI.
- Pusdiklatwas meraih penghargaan Lembaga Pelatihan Berprestasi Terbaik II kategori Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Pusat dari Lembaga Administrasi Negara RI.
- Pusdiklatwas memperoleh Akreditasi A Pelatihan Kedinasan dari LAN RI untuk Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar CPNS.

Penggunaan Keuangan



Penggunaan SDM (OH)



Rencana Aksi Peningkatan Kinerja

- Meningkatkan kompetensi SDM pengawasan melalui pelatihan yang terencana dan berkualitas, termasuk penguatan kompetensi pengajar melalui Training of Trainers (TOT).
- Memperluas kapasitas dan jangkauan pelatihan melalui pengembangan Kampus GIA Corpu Ciawi dan optimalisasi Balai Diklat daerah mulai 2026.
- Memperkuat kolaborasi SGO dan Pusdiklatwas dalam pemutakhiran kurikulum dan penyediaan narasumber.
- Meningkatkan kompetensi petugas LO/piket serta kualitas infrastruktur dan layanan pendukung pelatihan.
- Memperkuat tata kelola Pusdiklatwas melalui penguatan manajemen, pengendalian intern, optimaslisai pengelolaan anggaran dan aset serta optimalisasi perencanaan dan kinerja.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Pusdiklatwas BPKP Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan Pusdiklatwas untuk mendukung sasaran strategis BPKP dalam meningkatkan kualitas SDM Pengawasan. LKj ini sekaligus menjadi bukti pertanggungjawaban atas keberhasilan pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2025.

Mengawali tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis periode Tahun 2025-2029, Pusdiklatwas telah berhasil mencapai target sebesar 106,78% atas dua Sasaran Kegiatan Utama. Pada Sasaran Kegiatan 1 yaitu "Meningkatnya Kualitas Hasil dan Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengawasan" memiliki dua indikator dengan capaian rata-rata sebesar 105,26%. Indikator Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkatkan Kompetensinya Setelah Mengikuti Pelatihan tercapai dengan nilai 81,47 atau sebesar 101,83% dari target sebesar 80. Pada indikator Persentase Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Minimal Baik tercapai dengan nilai 100 atau sebesar 108,70% dari target sebesar 92. Adapun Sasaran Kegiatan 2 yaitu "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan" capaian indikator Persentase Efektifitas Pengendalian Intern Unit Kerja mendapatkan nilai 100 atau sebesar 120% dari target sebesar 70.

Keberhasilan tersebut menegaskan komitmen Pusdiklatwas untuk fokus pada peningkatan keahlian dan ketrampilan di bidang teknis pengawasan, manajemen pengawasan, pengembangan kepemimpinan dan mempromosikan budaya pembelajaran berkelanjutan, dalam ekosistem pembelajaran Government Internal Audit Corporate University (GIA Corpu) BPKP, termasuk penyelenggaraan sertifikasi profesi dan keahlian melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPKP.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja Pusdiklatwas BPKP di masa mendatang dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian visi dan misi BPKP.

Ciawi, 12 Januari 2026
Kepala Pusat,



Raden Murwantara



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi.....	8
B. Isu Strategis Organisasi.....	14
C. Kegiatan dan Produk Layanan.....	15
D. Sistematika Laporan.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029.....	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	24
B. Akuntabilitas Keuangan dan Sumber Daya Manusia.....	44
C. Analisis Efisiensi	45
D. Kinerja Lainnya Tahun 2025.....	46
BAB IV PENUTUP	43
KILAS PERISTIWA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP</u>	<u>10</u>
<u>Gambar 1. 2 Komposisi SDM Pusdiklatwas BPKP</u>	<u>13</u>
<u>Gambar 3. 1 Penghargaan sebagai Corpu Berdampak kategori Kementerian/Lembaga kepada BPKP.....</u>	<u>49</u>
<u>Gambar 3. 2 Penghargaan Lembaga Pelatihan Berprestasi Terbaik II kategori Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Pusat</u>	<u>50</u>
<u>Gambar 3. 3 Peraihan Akreditasi A Pelatihan Kedinasan dari LAN RI</u>	<u>50</u>

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklatwas BPKP ..	20
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi).....	21
Tabel 3. 1 Ringkasan Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025	25
Tabel 3. 2 Capaian IKK 1 Tahun 2025	28
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pusdiklatwas	30
Tabel 3. 4 Capaian <i>Output</i> Kegiatan Tahun 2025.....	37
Tabel 3. 5 Capaian Output Kegiatan Tahun 2025.....	37
Tabel 3. 6 Target dan Realisasi Keuangan menurut Sasaran Kegiatan	44
Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Program.....	44
Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Keuangan berdasarkan Sumber Dana	44
Tabel 3. 9 Target dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya Manusia (OH) Tahun 2025...	45
Tabel 3. 10 Analisis Efisiensi Kinerja Sasaran Program Pusdiklatwas BPKP Tahun 2025 ..	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kinerja *Outcome* Tahun 2025

Lampiran 2 Perhitungan Realisasi *Outcome* dan Anggaran Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Pusdiklatwas BPKP merupakan unit kerja eselon II mandiri di lingkungan BPKP yang memiliki tanggung jawab atas seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi pegawai BPKP maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan dalam pengawasan intern pemerintah. Tugas, fungsi, wewenang, struktur dan SDM, isu strategis, serta kegiatan dan produk/layanan Pusdiklatwas BPKP tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:





A. Tugas dan Fungsi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2025, Pusdiklatwas BPKP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusdiklatwas BPKP menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan kedinasan, fungsional, teknis substansi, dan sertifikasi;
2. Perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis substansi;
3. Perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur;
4. Penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. Evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan pelaksanaan; dan
6. Pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan pengelolaan barang milik negara di Pusdiklatwas.

Selain tugas dan fungsi tersebut diatas, Pusdiklatwas menjadi bagian dari sebuah ekosistem Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi *Government Internal Audit Corporate University* (GIA Corpu).

Sampai dengan akhir tahun 2025 Pusdiklatwas tengah melakukan pemutakhiran Perban BPKP terkait GIA Corpu untuk menyesuaikan proses bisnis dan struktur organisasi terkini. Revisi peraturan badan ini diperlukan sebagai payung hukum agar tata kelola *Government Internal Audit Corporate University* (GIA Corpu) selaras dengan perubahan struktur dan mekanisme kerja organisasi yang baru serta menyikapi terbitnya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (Corporate University).

Peran Pusdiklatwas sebagai *Learning Office* atau Unit Pengelola Pembelajaran sangat krusial dalam pelaksanaan tata kelola GIA Corpu, yang meliputi:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dan teknis pengembangan sistem pembelajaran sumber daya manusia;
2. Melakukan koordinasi dengan para Koordinator Pembelajaran pada Akademi, serta para Kepala Unit Pendukung Pembelajaran;
3. Memimpin dan melaksanakan operasionalisasi sistem, proses, dan kegiatan pembelajaran;
4. Menunjuk Pokja sesuai dengan Akademi yang dikembangkan pada GIA Corpu;
5. Melakukan supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas Pokja; dan
6. Menetapkan standar penjaminan mutu pembelajaran.

Peran sebagai *Learning Office* di atas sejalan dan bahkan memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklatwas sesuai tujuan dibentuknya GIA Corpu. Harapannya penguatan peran ini akan berdampak pada tercapainya Sasaran Strategis BPKP dalam meningkatkan kualitas SDM pengawasan untuk memperkuat SPIP dan kapabilitas APIP.

2. Struktur Organisasi

Penataan struktur organisasi Pusdiklatwas disusun untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dengan mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pola Hubungan dan Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan BPKP, sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP



Pusdiklatwas dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang memegang tanggung jawab penuh dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan, serta melaksanakan tugas selaku komite pembelajaran (*learning committee*) untuk seluruh akademi GIA Corpu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Pusat dibantu oleh Kepala Bagian Umum, 3 (tiga) Koordinator Kelompok Substansi dan 3 (tiga) Koordinator Wilayah yang memiliki uraian jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor: HK.01.01/KEP-223/K/SU/2025, sebagai berikut:

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Pusat dalam melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan BMN, rumah tangga dan kearsipan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bagian Umum membawahi Kelompok Substansi Keuangan; Kelompok Substansi Kepegawaian; dan Kelompok Substansi Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga, dan Kearsipan.

Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala Pusat dalam menjalankan tugas pengoordinasian penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyusunan rencana, analisis, evaluasi, dan pelaporan Pendidikan dan pelatihan, pengembangan materi, metodologi serta teknologi pembelajaran, serta pengelolaan peserta, widyaiswara dan fasilitator pendidikan dan pelatihan.

Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Pusat dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyiapan penyelenggaraan pelatihan teknis substansi penunjang pengawasan, sertifikasi non jabatan fungsional auditor, pelatihan kedinasan dan manajerial; perolehan akreditasi pelatihan kedinasan/dari lembaga penerbit sertifikat non JFA lainnya; serta penyelenggaraan pelatihan;

Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dan Manajemen Pengawasan Wilayah I mempunyai tugas membantu Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dalam pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelatihan serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga dan kearsipan yang diselenggarakan di Sumatera Utara dan wilayah lain sesuai ketentuan;

Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dan Manajemen Pengawasan Wilayah II mempunyai tugas membantu Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dalam pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelatihan serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga dan kearsipan yang diselenggarakan di Bali dan wilayah lain sesuai ketentuan;

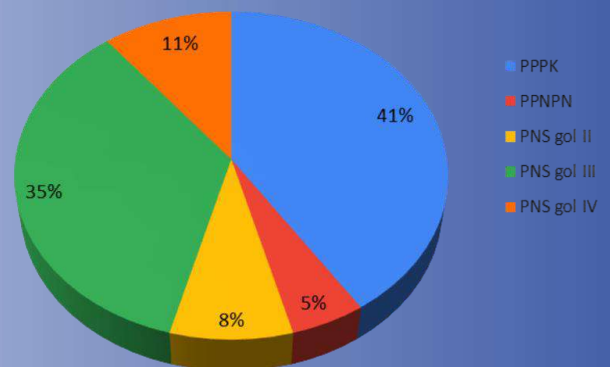
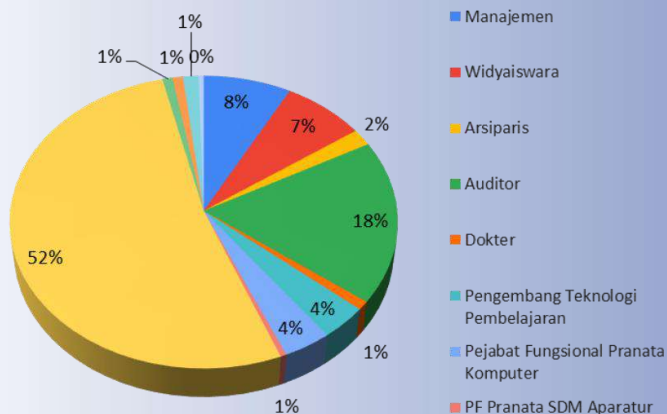
Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dan Manajemen Pengawasan Wilayah III mempunyai tugas membantu Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dalam pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelatihan serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga dan kearsipan yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan dan wilayah lain sesuai ketentuan.

Penguatan kelembagaan Pusdiklatwas dilakukan melalui pembentukan balai pendidikan dan pelatihan pada 3 (tiga) wilayah yaitu Medan, Denpasar, dan Makassar. Meskipun sampai dengan akhir tahun 2025 Koordinator Wilayah dan perangkatnya belum ditetapkan secara definitif, namun dalam beberapa tahun terakhir telah dilaksanakan penyelenggaraan pelatihan di balai pendidikan pada tiga wilayah tersebut dan beberapa perwakilan BPKP, yang dikoordinasikan oleh Koordinator Kelompok Substansi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Pusdiklatwas didukung oleh sumber daya manusia per 31 Desember 2025 sebanyak 205 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

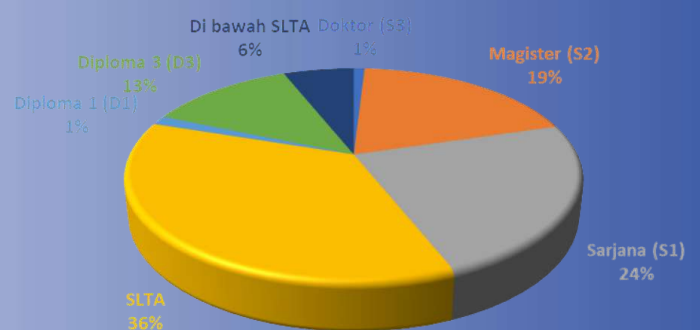
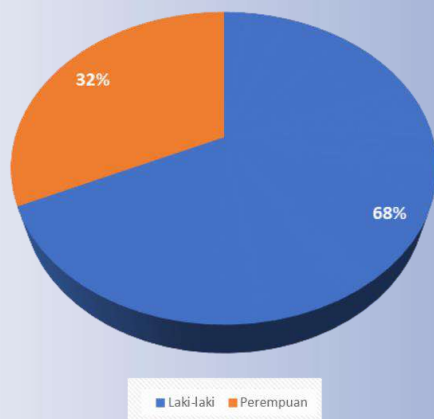
terdiri dari 117 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 88 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu juga didukung oleh 11 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Rincian ASN Pusdiklatwas BPKP berdasarkan jabatan, golongan kepangkatan, pendidikan dan gender dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Komposisi SDM Pusdiklatwas BPKP



Komposisi SDM menurut Jabatan

Komposisi SDM menurut Golongan



Komposisi SDM menurut Genre

Komposisi SDM menurut Pendidikan

B. Isu Strategis Organisasi

Pusdiklatwas BPKP memegang peran krusial dalam mendukung visi BPKP yaitu **“Menjadi Auditor Presiden yang Andal dan Terpercaya dalam Rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden”**. Strategi pengawasan tahunan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah dan publik. Peta strategis pengawasan intern BPKP dituangkan dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) untuk menjawab kebutuhan dan harapan dari *stakeholder* utama BPKP.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusdiklatwas menyelaraskan fungsinya dengan misi BPKP yaitu membantu Presiden dalam menjaga akuntabilitas keuangan, pembangunan, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelarasan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi pendidikan serta pelatihan pengawasan yang adaptif. Sebagai pusat pengembangan kompetensi, Pusdiklatwas memastikan bahwa seluruh SDM pengawasan memiliki kapabilitas yang relevan dengan dinamika zaman. Program kerja Pusdiklatwas BPKP disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan isu strategis antara lain:

1. **Posisi Strategis BPKP sebagai pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA).** Pusdiklatwas sebagai bagian dari Pembinaan JFA berperan dalam penyediaan pelatihan bagi APIP seluruh Indonesia. Posisi strategis BPKP tersebut memperkuat legitimasi Pusdiklatwas dalam menyediakan kurikulum dan pelatihan yang secara langsung terhubung dengan standar kompetensi auditor pemerintah.
2. **Pusdiklatwas BPKP sebagai mitra strategis pembelajaran APIP.** Otoritas dan pengalaman BPKP menjadikan Pusdiklatwas mitra kunci dalam meningkatkan kompetensi APIP, sekaligus peluang untuk memperluas volume pelatihan dan kolaborasi lintas instansi.
3. **Meluasnya kebutuhan kompetensi GRC.** Fenomena ini membuka peluang strategis bagi Pusdiklatwas untuk memperluas segmen pembelajaran ke seluruh unsur organisasi, termasuk pejabat struktural dan pengelola risiko, tidak hanya terbatas pada auditor.

4. **Lembaga pelatihan yang semakin banyak menjadi tantangan bagi Pusdiklatwas BPKP.** Meningkatnya jumlah pesaing menuntut Pusdiklatwas untuk terus berinovasi dalam metode dan layanan pelatihan agar tetap relevan dan menarik minat peserta.
5. **Efisiensi anggaran menuntut Pusdiklatwas BPKP menghadirkan pelatihan berkualitas dan terjangkau.** Inovasi terus dilakukan untuk menyajikan pelatihan berkualitas dengan biaya terjangkau, memastikan pengembangan kompetensi tetap berjalan di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
6. **Adanya risiko kepuasan pelanggan, pengaduan, banding, dan tuntutan hukum.** Penerapan mekanisme penjaminan mutu yang sistematis dilakukan untuk memastikan layanan yang terstandarisasi, kredibel, dan akuntabel demi menjaga reputasi lembaga.

Dalam tataran *corporate university*, Pusdiklatwas BPKP berperan sebagai *learning office* yang menyelenggarakan rantai nilai pembelajaran/ *Learning Value Chain (LVC) Government Internal Audit Corporate University (GIA Corpu)*. Penyelenggaraan LVC GIA Corpu dilaksanakan sebagai strategi peningkatan kinerja organisasi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPKP.

C. Kegiatan dan Produk Layanan

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pengawasan yang kompeten dan berintegritas, selama tahun 2025 Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi para pegawai di lingkungan BPKP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Instansi Lainnya seperti POLRI, TNI, BUMN/D, BLU/D Rumah Sakit, dan Perguruan Tinggi. Sumber dana kegiatan pelatihan dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman Luar Negeri (STAR).

Produk/Layanan diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP terdiri atas:

1. Diklat Kedinasan untuk BPKP
 - a. Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA);
 - b. Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
 - c. Diklat Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS.
2. Diklat Teknis Substansi untuk BPKP dan non BPKP
 - a. Diklat Teknis Substansi Pengawasan;
 - b. Diklat Teknis Substansi Non Pengawasan.
3. Diklat Fungsional Auditor untuk BPKP dan non APIP
 - a. Pembentukan Auditor Terampil;
 - b. Pembentukan Auditor Ahli Pertama;
 - c. Penjenjangan Auditor Ahli Muda;
 - d. Penjenjangan Auditor Ahli Madya; dan
 - e. Penjenjangan Auditor Ahli Utama.
4. Diklat Sertifikasi Non JFA untuk BPKP dan non KLDBUBL
 - a. Diklat sertifikasi yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan Uji Kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPKP;
 - b. Diklat sertifikasi yang diselenggarakan bekerja sama dengan lembaga diklat dari asosiasi profesi dan/atau LSP lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.

Metode pembelajaran yang dilakukan selama tahun 2025 mencakup:

1. Tatap muka secara klasikal di kelas serta pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan zoom;
2. *Blended learning* yaitu *e-learning* dan tatap muka;
3. *Hybrid* yaitu pembelajaran tatap muka dan PJJ dengan zoom;
4. *Self learning* berupa *Massive Open Online Course* (MOOC) dan *Micro learning*.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja (LKj) Pusdiklatwas BPKP Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan Pusdiklatwas untuk mendukung sasaran strategis BPKP dalam meningkatkan kualitas SDM Pengawasan. LKj ini sekaligus menjadi bukti pertanggungjawaban atas keberhasilan pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2025.

Sistematika Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2024 terdiri dari empat bab dengan materi sajian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Perencanaan Kinerja
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
4. Bab IV Penutup
5. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Perencanaan kinerja merupakan proses strategis untuk menetapkan arah kebijakan dan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pusdiklatwas BPKP. Bab ini menyajikan ikhtisar mengenai rencana kinerja jangka menengah yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) serta komitmen kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Uraian dalam bab ini mencakup penetapan indikator kinerja dan target yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPKP.



A. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

Penyusunan program dan kegiatan Pusdiklatwas BPKP periode 2025-2029 mengacu pada program dan kegiatan BPKP pada periode yang sama. Program dan kegiatan Pusdiklatwas BPKP dirumuskan untuk mendukung visi, misi dan tujuan BPKP yang tercermin dalam 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional;
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/D/BU;
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BPKP.

Pusdiklatwas BPKP sebagai unit kerja BPKP berkontribusi terhadap capaian Sasaran Strategis 4 BPKP yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BPKP** melalui pelaksanaan **Program Pengawasan Pembangunan**.

Program yang telah ditetapkan kemudian diterjemahkan ke dalam kegiatan **Penyelenggaraan Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan**, sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdiklatwas BPKP, dimana sasaran kegiatan yang akan dicapai yaitu **Meningkatnya Kualitas Hasil dan Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengawasan** dan **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan**.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dirumuskan Indikator Kinerja Kegiatan dan target kinerja yang harus dicapai pada periode 2025-2029 dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklatwas BPKP

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Hasil dan Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengawasan						
IKK 1.1: Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkatkan Kompetensinya Setelah Mengikuti Pelatihan	Persen (%)	80	82	83	85	87
IKK 1.2: Persentase Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Minimal “baik”	Persen (%)	92	93	94	95	96
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan						
IKK 2.1: Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00
IKK 2.2: Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen (%)	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
IKK 2.3: Nilai IKPA Unit Kerja	Nilai	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
IKK 2.4: Predikat Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Satker	Predikat	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif
IKK 2.5: Predikat SAKIP Unit Kerja	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

B. Perjanjian Kinerja Pusklatwas BPKP Tahun 2025

Berdasarkan *cascading* kinerja dari Biro MKOT BPKP, Perjanjian kinerja Pusklatwas BPKP Tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Hasil dan Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengawasan	1.1	Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkatkan Kompetensinya Setelah Mengikuti Pelatihan	Persen (%)	80,00
		1.2	Persentase Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Minimal "Baik"	Persen (%)	92,00
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pusat	2.1	Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	85,00

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	2.2	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen (%)	70,00
	2.3	Nilai IKPA Unit Kerja	Nilai	95,00
	2.4	Predikat Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Satker	Predikat	Efektif
	2.5	Predikat SAKIP Unit Kerja	Predikat	Baik

Untuk mencapai sasaran program tersebut, tahun 2025 Pusdiklatwas BPKP didukung dengan total anggaran sebesar Rp 188.571.435.000,00 (Revisi ke-9) dengan rincian program:

1. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sebesar Rp102.848.974.000,00.
2. Pelaksanaan Dukungan Manajemen sebesar Rp85.722.461.000,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2025 yang disajikan dalam BAB ini meliputi capaian kinerja selama tahun 2025, kinerja lainnya, dan akuntabilitas keuangan.





A. CAPAIAN KINERJA

1. Kerangka Pengukuran

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, Pusdiklatwas mengyimpulkan data kinerja dari seluruh bidang di lingkungan Pusdiklatwas BPKP yang terkait dengan target kinerja tahun 2025. Data kinerja tersebut berupa target dan realiasi kinerja, rincian kinerja, target dan realisasi anggaran, target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia, berbagai penghargaan yang diterima serta informasi lain yang terkait dengan kinerja. Data kinerja tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025. Pengumpulan dan pengolahan data kinerja dimaksudkan untuk memperoleh data dan menyajikan informasi kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja dengan tetap memperhatikan prinsip manfaat dan biaya, efisien serta efektifitas.

2. Capaian Kinerja *Outcome*

Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2025 merupakan akuntabilitas kinerja pada Tahun pertama Renstra Pusdiklatwas BPKP tahun 2025-2029. Pusdiklatwas BPKP memiliki 2 Sasaran Kegiatan yang keberhasilannya dinilai melalui 7 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Rerata capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2025 adalah 106,78% dimana seluruh sasaran kegiatan mencapai lebih dari 100% dengan rincian capaian sebagai berikut:

- a. Rata-rata capaian kinerja pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Hasil dan Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengawasan adalah sebesar 105,26%.
- b. Rata-rata capaian kinerja pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan adalah sebesar 108,30.

Capaian kinerja sasaran program di atas diukur melalui 7 IKK. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Ringkasan Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Kualitas Hasil dan Penyelenggaraan Pelatihan SDM Pengawasan					
1.1	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat	Persen	80	81,47	101,83	●
1.2	Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal "Baik"	Persen	92	99,88	108,70	●
	Rerata Capaian SK 1				105,26	
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusdiklatwas					
2.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	85	91,05	107,12	●
2.2	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen (%)	70	100,00	120,00	●
2.3	Nilai IKPA Unit Kerja	Nilai	95	89,64	94,36	●
2.4	Nilai Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Satker	Predikat	Efektif	Efektif	100,00	●
2.5	Nilai SAKIP Unit Kerja	Predikat	Baik	Memuaskan	120,00	●
	Rerata Capaian SK 2				108,30	
	Rerata Capaian Kinerja Kegiatan				106,78	

Keterangan : ● mencapai/melampaui target
● belum mencapai target

Pada tahun 2025 terdapat 7 IKK yang ditetapkan untuk mengukur kinerja Pusdiklatwas dimana 6 IKK dengan capaian 100% atau lebih dan 1 IKK masih berada di bawah 100%. Capaian tertinggi adalah sebesar 120% pada IKK “Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)” serta IKK “Nilai SAKIP Unit Kerja” dan capaian terendah adalah sebesar 94,36% pada IKK “Nilai IKPA Unit Kerja”. Uraian masing-masing sasaran kegiatan dan IKK adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Hasil dan Penyelenggaraan Pelatihan SDM Pengawasan Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Hasil dan Penyelenggaraan Pelatihan SDM Pengawasan Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah sebesar 105,20%. Sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 2 IKK yaitu:

1.1. Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat

1.2. Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal "Baik"

Capaian kinerja IKK Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat adalah sebesar 101,83% dan IKK Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal "Baik" adalah sebesar 108,70%.

1.1. Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Hasil dan Penyelenggaraan Pelatihan SDM Pengawasan Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan IKK Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat tahun 2025 atau tahun pertama Renstra 2025-2029 adalah sebesar 101,83%, yaitu realisasi 81,47% dari target 80%. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa Pusdiklatwas telah berhasil

meningkatkan kompetensi SDM Pengawasan yang dapat mendukung penguatan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pengawasan intern pemerintah.

Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat digunakan untuk mengukur kinerja Pusdiklatwas yang dicerminkan dari SDM yang menunjukkan peningkatan kompetensinya dan dapat memberikan *impact* di unit kerja setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas. IKK ini diukur dari:

a. Sub IKK 1, yaitu rata-rata hasil evaluasi diklat (bobot 60%)

Sub IKK 1 diperoleh dari rata-rata evaluasi pasca diklat disesuaikan dengan jenis diklat yang dilaksanakan, di antaranya:

- 1) Diklat kedinasan yaitu Jumlah peserta yang lulus diklat kedinasan dibagi dengan jumlah peserta ujian diklat kedinasan.
- 2) Diklat JFA yaitu Jumlah peserta yang lulus ujian mengikuti pelatihan (*post test*) sebagai prasyarat untuk mengikuti sertifikasi/uji kompetensi.
- 3) Diklat Sertifikasi Non-JFA yaitu Jumlah peserta diklat yang lulus ujian sertifikasi dibagi dengan jumlah peserta ujian sertifikasi Non-JFA.
- 4) Diklat Teknis Substansi yaitu Jumlah peserta yang lulus atau memperoleh hasil baik dalam evaluasi level 2 atau evaluasi level 3 sesuai dengan substansi pelatihan yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis substansi.

b. Sub IKK 2, yaitu pengukuran *impact* di unit kerja (bobot 40%).

Sub IKK 2 diperoleh dari rata-rata hasil pengukuran *impact* di unit kerja melalui *survey*/konfirmasi ke atasan peserta diklat. *Survey* dilaksanakan paling cepat 3 bulan dan paling lama 6 bulan setelah mengikuti diklat.

Uraian capaian pada sub IKK 1 dan sub IKK 2 disajikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Capaian IKK 1 Tahun 2025

SUB IKK	Bobot	Penjabaran Kinerja	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta Lulus	Realisasi
1	0,6	1. Diklat Kedinasan	1.793,00	1.793,00	100,00
		2. Diklat JFA	3.667,00	3.610,00	98,45
		3. Diklat Sertifikasi Non-JFA	785,00	770,00	98,09
		4. Diklat Teknis Substansi	16.577,00	16.517,00	99,64
2	0,4	Rata-rata hasil pengukuran <i>impact</i> di unit kerja melalui <i>survey</i> /konfirmasi ke atasan peserta diklat.			55,10
Rerata Realisasi					81,47
Capaian (%)					101,83

Keberhasilan pencapaian kinerja IKK Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat yang melampaui target dipengaruhi oleh terselenggaranya pendidikan dan pelatihan secara optimal, mulai dari perencanaan diklat yang baik, meliputi analisis kebutuhan dan desain pelatihan yang selaras dengan kebutuhan serta mampu menjawab tantangan ke depan didukung oleh tenaga pengajar yang kompeten, materi pelatihan yang relevan, serta ketersediaan infrastruktur pelatihan yang memadai.

Upaya ke depan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi SDM pengawasan melalui diklat dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara optimal, yang diawali dengan analisis kebutuhan yang tepat, perancangan pelatihan serta materi yang relevan dan terkini, penguatan kompetensi pengajar melalui *Training of Trainers* (TOT), serta penerapan inovasi pembelajaran digital dan pengembangan infrastruktur pelatihan.

1.2. Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal "Baik"

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Hasil dan Penyelenggaraan Pelatihan SDM Pengawasan Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan IKK

Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal "Baik" tahun 2025 atau tahun pertama Renstra 2025-2029 adalah sebesar 108,70%, yaitu realisasi 100% dari target 92%. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa Pusdiklatwas telah berhasil menyelenggarakan pelatihan dengan baik dan memuaskan para stakeholders pelatihan.

Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal "Baik" digunakan untuk mengukur kinerja Pusdiklatwas yang dicerminkan dari hasil evaluasi baik terhadap penyelenggaraan pelatihan meliputi kemudahan akses dan kecukupan informasi pelatihan, kualitas manajemen penyelenggaraan pelatihan, kualitas pelaksanaan/penyelenggaraan pelatihan, kualitas pelayanan pengaduan. Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal "Baik" diukur dari jumlah realisasi diklat yang memperoleh hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal dengan kategori "baik" dibagi jumlah diklat yang diselenggarakan dalam satu periode kalender diklat.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam mendukung pencapaian hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal kategori "Baik" antara lain melalui pemberian kemudahan akses dan informasi bagi peserta pelatihan, penyelenggaraan pelatihan secara optimal yang didukung oleh petugas LO/piket yang kompeten dan responsif, penyediaan infrastruktur pendukung pelatihan, meliputi mess, ruang kelas, dan konsumsi yang memadai, serta penanganan keluhan peserta secara efektif.

Pusdiklatwas akan terus menjaga dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelatihan melalui penerapan inovasi teknologi untuk mempermudah akses dan penyampaian informasi, penguatan kompetensi petugas LO/piket melalui pelatihan layanan prima, serta pengembangan infrastruktur pelatihan, khususnya peningkatan kenyamanan mess, ruang kelas, dan layanan konsumsi.

2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusdiklatwas

Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusdiklatwas adalah sebesar 108,30%. Sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 5 IKK yaitu:

- 2.1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
- 2.2. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)
- 2.3. Nilai IKPA Unit Kerja
- 2.4. Nilai Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Satker
- 2.5. Nilai SAKIP Unit Kerja

Uraian capaian masing-masing IKK pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusdiklatwas disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pusdiklatwas

No	Sasaran Kinerja/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan				
2.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	85,00	91,05	107,12
2.2	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen (%)	70,00	100,00	120,00
2.3	Nilai IKPA Unit Kerja	Nilai	95,00	89,64	94,36
2.4	Nilai Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Satker	Predikat	Efektif	Efektif	100,00
2.5	Nilai SAKIP Unit Kerja	Predikat	Baik	Memuaskan	120,00
Rerata Capaian (%)					108,30

a. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusdiklatwas dengan IKK Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja tahun 2025 atau tahun pertama Renstra 2025-2029 adalah sebesar 107,12%, yaitu realisasi 91,05% dari target 85%. Nilai tersebut merupakan hasil monitoring perkemabnagan pelaksanaan pembangunan zona integritas Wilayah Briokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa Pusdiklatwas telah berhasil berkinerja tinggi melalui

pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Nilai Skor Zona Integritas pada unit kerja dimaksudkan untuk menilai sejauh mana unit kerja telah mewujudkan percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima. Penilaian Zona Integritas (ZI) pada instansi pemerintah terdiri atas dua komponen utama, yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen Pengungkit menilai upaya dan proses pembangunan integritas melalui enam area perubahan, meliputi manajemen perubahan, penataan tata-laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Komponen Hasil menilai dampak dari pelaksanaan Zona Integritas, yang mencakup terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam mendukung pencapaian nilai skor zona integritas antara lain melalui melalui penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengawasan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel. Selain itu, Pusdiklatwas meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan pelatihan yang didukung SDM kompeten, sarana prasarana yang memadai, program pelatihan yang sesuai kebutuhan pemangku kepentingan, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang dikomunikasikan secara efektif kepada publik.

Pusdiklatwas berkomitmen untuk terus menjaga dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi di

lingkungan Pusdiklatwas. Sejalan dengan *Area of Improvement* (Aoi) hasil evaluasi tahun 2025, strategi peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas akan dilakukan melalui penguatan penataan sistem manajemen aparatur dengan analisis kesenjangan kompetensi pegawai, penguatan sistem akuntabilitas melalui penerapan penghargaan *employee of the month* (EoM) berbasis kinerja sesuai ketentuan, penyusunan langkah strategis peningkatan capaian kinerja, penguatan pengendalian gratifikasi melalui penetapan petugas atau tim khusus, serta evaluasi dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan secara berkala.

b. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusdiklatwas dengan IKK Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja) tahun 2025 atau tahun pertama Renstra 2025-2029 adalah sebesar 120%, yaitu realisasi 100% dari target 70%. Nilai tersebut merupakan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Pusdiklatwas menggunakan pedoman pengukuran yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama BPKP. Capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa pengendalian intern dalam mengelola risiko kunci guna mendukung pencapaian tujuan Pusdiklatwas telah berjalan secara efektif.

Pengukuran Efektifitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja) dilakukan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern dalam mengendalikan risiko kunci untuk memastikan pencapaian tujuan unit kerja. Pengendalian intern yang efektif diharapkan mampu menurunkan tingkat risiko hingga berada di bawah ambang batas atau selera risiko yang telah ditetapkan. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja) diukur dari dua aspek yaitu Kualitas Pengendalian Intern dan Keterjadian *Fraud*. Aspek Kualitas Pengendalian Intern dinilai melalui dimensi risiko kunci dan risiko

prioritas atas indikator kinerja serta kecukupan dan efektifitas pengendalian intern *existing control* dan rencana tindak pengendalian (RTP). Sementara itu, aspek Keterjadian *Fraud* dinilai dari keterjadian tindakan kecurangan (*fraud*) dan/atau pelanggaran hukum lainnya.

Pusdiklatwas akan terus memperkuat pengendalian intern atas setiap risiko kunci untuk menjaga pencapaian tujuan organisasi melalui penerapan manajemen risiko yang optimal, dimulai dari identifikasi risiko yang tepat dan relevan pada setiap proses bisnis dan sasaran organisasi serta memastikan efektivitas pengendalian intern yang diterapkan.

c. Nilai IKPA Unit Kerja

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusdiklatwas dengan IKK Nilai IKPA Unit Kerja tahun 2025 atau tahun pertama Renstra 2025-2029 adalah sebesar 94,36%, yaitu realisasi 89,64% dari target 95%. Nilai IKPA diperoleh dari hasil pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja yang bersumber dari data OMSPAN Kementerian Keuangan dan dihitung berdasarkan indikator kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pelaksanaan anggaran. Capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran pada Pusdiklatwas.

Monitoring nilai IKPA bertujuan untuk memastikan kualitas dan kepatuhan pelaksanaan anggaran, mendeteksi dini permasalahan dan risiko, serta mendorong efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Dasar penilaian dengan melihat data realisasi anggaran dan kepatuhan pelaksanaan anggaran yang diinput dan diproses dalam sistem perbendaharaan.

Capaian nilai IKPA yang tidak sesuai target dipengaruhi oleh permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapat ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dengan realisasi anggaran, yang menunjukkan adanya perencanaan yang kurang tepat.
2. Realisasi belanja belum merata sepanjang tahun anggaran, ditandai dengan realisasi belanja yang relatif lebih tinggi pada triwulan IV yang berpotensi memengaruhi kualitas belanja dan meningkatkan deviasi.
3. Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) dan/atau TUP belum seluruhnya diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
4. Koordinasi antarunit perencanaan, pelaksana kegiatan/pengadaan, dan fungsi keuangan internal satuan kerja masih perlu ditingkatkan.

Upaya yang telah dilakukan Pusdiklatwas tahun 2025 untuk memaksimalkan pelaksanaan dan pengendalian anggaran adalah dengan melakukan monitoring terhadap kegiatan, proses PBJ, realisasi anggaran, dan penyampaian laporan tepat waktu/sesuai jadwal.

Rencana tindak yang akan dilakukan Pusdiklatwas untuk mengawal pencapaian nilai IKPA ke depannya antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring dan revidi deviasi Halaman III DIPA secara berkala serta memastikan penginputan Rencana Penarikan Dana Harian (RPDH) dilakukan secara realistis dan tepat waktu.
2. Menerapkan pola penyerapan anggaran yang terencana dan proporsional sepanjang tahun untuk menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.
3. Meningkatkan kompetensi pengelola keuangan melalui penyelenggaraan workshop atau pelatihan rutin terkait regulasi dan pemanfaatan aplikasi pengelolaan anggaran (OMSPAN/SAKTI).
4. Memperkuat koordinasi antarunit terkait (perencanaan, pengadaan, dan keuangan) guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan anggaran berjalan selaras dan tepat waktu.

d. Nilai Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Satker

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusdiklatwas dengan IKK Nilai Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Satker tahun 2025 atau tahun pertama Renstra 2025-2029 memperoleh predikat efektif dari target nilai efektif. Nilai PIPK diperoleh dari hasil penilaian penerapan PIPK oleh internal Pusdiklatwas. Capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Pusdiklatwas telah berjalan dengan efektif.

Penilaian PIPK bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian intern pelaporan keuangan untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan. Rancangan pengendalian atas proses dan prosedur mencakup langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan dalam pelaporan keuangan.

Penilaian PIPK dilakukan dengan menilai kualitas/efektivitas pengendalian intern pada akun signifikan laporan keuangan.

Pusdiklatwas akan terus menjaga dan meningkatkan kinerja penerapan PIPK yang efektif dengan melakukan inventarisasi dan pencatatan aset secara akurat, melakukan pemutakhiran aset secara berkala serta melakukan supervisi berjenjang terhadap pencatatan aset.

e. Nilai SAKIP Unit Kerja

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusdiklatwas dengan IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025 atau tahun pertama Renstra 2025-2029 memperoleh nilai sebesar 86,68, kategori “A” dengan predikat “Memuaskan” dari target nilai predikat baik. Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi atas AKIP tahun 2025 pada Pusdiklatwas oleh Inspektorat BPKP. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sejalan dengan capaian kerjanya, kualitas

pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pusdiklatwas berada pada tingkat yang memuaskan.

SAKIP bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pelaksanaan SAKIP merupakan bagian pelaksanaan tata kelola pemerintahan, yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kinerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran, serta pelaporan kinerja.

Upaya yang telah dilakukan Pusdiklatwas untuk mendukung pencapaian nilai SAKIP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat BPKP.
2. Melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang berorientasi hasil sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdiklatwas.
3. Menyusun penjabaran kinerja triwulan III secara rinci dan selaras mulai dari tingkat eselon II hingga tingkat subkoordinator yang sesuai dengan uraian jabatan dan proses bisnis Pusdiklatwas serta mempertimbangkan indikator *outcome* dan *output* sesuai dengan jabatan.
4. Menyajikan informasi kondisi, hambatan/permasalahan dalam pencapaian kinerja serta rencana aksi pada laporan kinerja triwulan sebagai bentuk monitoring atas capaian kinerja.

Rencana tindak yang akan dilakukan oleh Pusdiklatwas dalam meningkatkan nilai SAKIP ke depan antara lain:

1. Menyusun penjabaran kinerja sejak awal tahun secara rinci dan selaras mulai dari tingkat eselon II hingga tingkat subkoordinator yang sesuai dengan uraian jabatan dan proses bisnis Pusdiklatwas

serta mempertimbangkan indikator outcome dan output sesuai dengan jabatan.

2. Mengawal penyusunan seluruh Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
3. Melakukan monitoring terhadap seluruh indikator kinerja pada laporan kinerja triwulan mencakup kondisi, hambatan/permasalahan pencapaian kinerja serta rencana aksi.

3. Capaian Kinerja *Output*

Capaian *output* kegiatan Pusdiklatwas tahun 2025 adalah sebesar 453,82%.

Rincian capaian *output* tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Capaian *Output* Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Capaian
1	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	752,61
2	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	155,04
Rerata Capaian (%)		453,82

Capaian kinerja *output* kegiatan Pusdiklatwas tahun 2025 dapat diuraikan dalam capaian rincian *output* yang disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Capaian *Output* Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Rincian <i>Output</i>	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan				752,61
1.1	Diklat Fungsional Auditor RM	Orang	936,00	1236,00	132,05
1.2	Diklat Fungsional Auditor PNB	Orang	2.820,00	2587,00	91,74
1.3	Diklat Teknis Substansi RM	Orang	2.056,00	5632,00	273,93
1.4	Diklat Teknis Substansi PNB	Orang	11.700,00	13883,00	118,66
1.5	Diklat Teknis Substansi STAR	Orang	204,00	202,00	99,02
1.6	Diklat Kedinasan RM	Orang	2.000,00	1793,00	89,65
1.7	UD/UPKP RM	Orang	1,00	67,00	6700,00
1.8	Diklat Sertifikasi Non JFA RM	Orang	102,00	107,00	104,90
1.9	Diklat Sertifikasi Non JFA PNB	Orang	420,00	685,00	163,10
1.10	Pelatihan Daring Massal (MOOC) RM	Orang	900,00	13654,00	1517,11
1.11	Pelatihan Daring Massal (MOOC) PNB	Orang	1.000,00	2408,00	240,80
1.12	Seminar - RM	Orang	5.000,00	5098,00	101,96
1.13	Seminar - PNB	Orang	601,00	842,00	140,10
1.14	Hasil Pengembangan GIA Corpu RM	Orang	116,00	1250,00	1077,59

No	Program/Kegiatan/Rincian <i>Output</i>	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.15	Hasil Pengembangan GIA Corpu PNB	Orang	80,00	195,00	243,75	
1.16	Hasil Pengembangan GIA Corpu STAR	Orang	1,00	16,00	1600,00	
1.17	Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi PNB	Orang	6,00	6,00	100,00	
2	Pelaksanaan Dukungan Manajemen				155,04	
2.1	Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	100,00	
2.2	Layanan Sarana Internal		Unit	283,00	646,00	228,27
2.3	Layanan Prasarana Internal		Unit	38,00	52,00	136,84
Rerata Capaian Kegiatan(%)					453,82	

Kinerja *output* Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dicapai melalui:

1. Diklat Fungsional Auditor

Penyelenggaraan Diklat Fungsional Auditor yang bersumber dari RM menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target sebanyak 936 peserta, realisasi peserta mencapai 1.236 orang, sehingga tingkat capaian melebihi target dengan persentase 132,05%. Sebaliknya, pada Diklat Fungsional Auditor yang didanai melalui PNB, realisasi peserta tercatat sebanyak 2.587 orang dari target 2.820 orang, dengan tingkat pencapaian sebesar 91,74%. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada partisipasi pelatihan, mengingat sebagian besar peserta Pusklatwas berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Diklat Fungsional Auditor yang dilaksanakan di tahun 2025 terdiri dari:

- a. Pembentukan Fungsional Auditor Terampil
- b. Pembentukan Fungsional Auditor Ahli Pertama
- c. Penjenjangan Auditor Ahli Muda
- d. Penjenjangan Auditor Ahli Madya
- e. Penjenjangan Auditor Ahli Utama

2. Diklat Teknis Substansi

Penyelenggaraan Diklat Teknis Substansi menunjukkan kinerja yang baik. Diklat Teknis Substansi yang didanai melalui PNBPN terealisasi sebanyak 13.883 peserta dari target 11.700 peserta, dengan tingkat capaian 118,66%, sehingga melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, Diklat Teknis Substansi STAR terealisasi sebanyak 202 peserta dari target 204 peserta, dengan tingkat capaian 99,02%, yang menunjukkan pencapaian target hampir sepenuhnya.

Diklat teknis substansi yang diselenggarakan pada tahun 2025 yaitu:

a. **Diklat Teknis Substansi Pengawasan** terdiri dari pelatihan:

- 1) Audit Investigatif
- 2) Evaluasi Tata Kelola TI dan Audit TIK
- 3) Audit Kinerja Berbasis Risiko Lingkup Pelayanan Publik
- 4) Desain Grafis untuk Pelaporan Eksekutif
- 5) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)
- 6) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
- 7) *Training of Trainer* (ToT) Instruktur Pelatihan Manajemen Tata Kelola yang Baik bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)
- 8) Reviu Rencana Kerja & Anggaran
- 9) Internal Audit *Refreshment*
- 10) Pelatihan Pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 11) Pelatihan *Probity* Audit Pengadaan Barang/Jasa
- 12) Audit Badan Layanan Umum
- 13) Audit BMD/BMN

- 14) Audit for Non Auditor
 - 15) Audit Ketaatan
 - 16) Audit Kinerja Berbasis Risiko
 - 17) Audit PBJ
 - 18) Audit Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD
 - 19) Audit Pengelolaan Keuangan Desa Berbantuan Aplikasi Siswaskeudes
 - 20) Audit Tingkat Dasar
 - 21) *Digital Forensic* dan *Data Analitic*
 - 22) Evaluasi Tata Kelola TI dan Audit TIK
 - 23) *Fraud Control Plan*
 - 24) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
 - 25) Reviu RPJMD dan Renstra OPD
 - 26) Penulisan Laporan Hasil Audit Intern
 - 27) Reviu Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja
- b. **Diklat Teknis Substansi Manajemen Pengawasan** terdiri dari pelatihan:
- 1) *Managing Performance*
 - 2) Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - 3) Pengadaan Langsung bagi Pelaku Pengadaan
 - 4) Pengawasan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
 - 5) Pengelolaan Keuangan Negara
 - 6) Penyusunan Desain Penugasan Pengawasan
 - 7) Penyusunan Laporan Eksekutif Daerah
 - 8) Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan Aplikasi FORSA BLUD
 - 9) Reputasi dan *Branding*
 - 10) Terintegrasi Penyusunan Desain Pengawasan
 - 11) *Training Of Trainer (ToT)* Instruktur Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
 - 12) Manajemen Pengawasan
 - 13) Evaluasi atas Implementasi SAKIP

- 14) Fraud Risk Assessment
- 15) Manajemen Barang Milik Daerah
- 16) Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (MROSP)
- 17) Manajemen Strategis
- 18) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
- 19) Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 20) Evaluasi Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko
- 21) Manajemen Barang Milik Daerah (BMD)
- 22) Manajemen Risiko Eksekutif
- 23) Manajemen Risiko Korporasi
- 24) Maturitas SPIP Terintegrasi
- 25) Penyelenggaraan SAKIP
- 26) *Policy Impact Evaluation* dan *Data Analytic*
- 27) Peran konsultasi
- 28) Sistem Akuntansi Instansi
- 29) *Excellence Service*
- 30) Konseling Dasar bagi Konselor
- 31) Pelatihan & Sertifikasi PBJP Level 1

3. Diklat Kedinasan, UD/UPKP

Pelaksanaan kegiatan Diklat menunjukkan capaian yang bervariasi. Diklat Kedinasan yang bersumber dari RM terealisasi sebanyak 1.793 peserta dari target 2.000 peserta, dengan tingkat capaian 89,65%. Sementara itu, kegiatan UD/UPKP RM terealisasi sebanyak 67 peserta dari target 1 peserta, dengan tingkat capaian 6.700%.

Diklat Kedinasan, UD/UPKP yang diselenggarakan pada tahun 2025 yaitu:

- 1) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- 2) Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- 3) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
- 4) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)

5) *Training of Trainer (ToT)* Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

4. Diklat Sertifikasi *Non-JFA*

Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Non JFA menunjukkan kinerja yang baik. Diklat Sertifikasi Non JFA yang bersumber dari RM terealisasi sebanyak 107 peserta dari target 102 peserta, dengan tingkat capaian 104,90%. Sementara itu, Diklat Sertifikasi Non JFA yang didanai melalui PNBPN terealisasi sebanyak 685 peserta dari target 420 peserta, dengan tingkat capaian 163,10%, sehingga secara signifikan melampaui target yang telah ditetapkan.

Diklat Sertifikasi *Non-JFA* yang diselenggarakan pada tahun 2025 yaitu:

- 1) Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi
- 2) Pelatihan dan Sertifikasi FRMP (Fraud Risk Management Professional)
- 3) *Certified Corporate Risk Analyst* (CCRA)
- 4) *Certified Government Chief Audit Executive* (CGCAE)
- 5) *Certified Government Risk Assurer* (CGRA)
- 6) *Certified Government Risk Executive* (CGRE)
- 7) *Certified Government Risk Specialist* (CGRS)
- 8) *Certified Internal Audit Executive* (CIAE)
- 9) *Certified Risk Executive Leader* (CREL)

5. Pelatihan Daring Massal (MOOC)

Pelaksanaan Pelatihan Daring Massal (MOOC) menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Pelatihan Daring Massal (MOOC) yang bersumber dari RM terealisasi sebanyak 13.654 peserta dari target 900 peserta, dengan tingkat capaian 1.517,11%, sedangkan Pelatihan Daring Massal (MOOC) yang didanai melalui PNBPN terealisasi sebanyak 2.408 peserta dari target 1.000 peserta, dengan tingkat capaian 240,80%. Hasil tersebut menunjukkan tingginya tingkat partisipasi dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan daring massal.

6. Seminar/Webinar

Penyelenggaraan kegiatan seminar menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Seminar yang bersumber dari RM terealisasi sebanyak 5.098 peserta dari target 5.000 peserta, dengan tingkat capaian 101,96%. Sementara itu, seminar

yang didanai melalui PNBPN terealisasi sebanyak 842 peserta dari target 601 peserta, dengan tingkat capaian 140,10%, yang mencerminkan kinerja melampaui target yang telah ditetapkan.

7. Pengembangan GIA Corpu

Capaian Hasil Pengembangan GIA Corpu menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan melampaui target pada seluruh sumber pendanaan. Hasil Pengembangan GIA Corpu yang bersumber dari RM terealisasi sebanyak 1.250 orang dari target 116 orang, dengan tingkat capaian 1.077,59%. Selanjutnya, Hasil Pengembangan GIA Corpu yang didanai melalui PNBPN terealisasi sebanyak 195 orang dari target 80 orang, dengan tingkat capaian 243,75%. Adapun Hasil Pengembangan GIA Corpu STAR terealisasi sebanyak 16 orang dari target 1 orang, dengan tingkat capaian 1.600%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengembangan GIA Corpu serta tingginya tingkat pemanfaatan dan partisipasi terhadap program yang diselenggarakan.

8. Penilaian Potensi dan Kompetensi PNBPN

Secara keseluruhan, pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi yang didanai melalui PNBPN telah mencapai target yang ditetapkan. Kegiatan tersebut terealisasi sebanyak 6 orang dari target 6 orang, dengan tingkat capaian 100%.

9. Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran diukur dengan menghitung realisasi layanan gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor yang dihasilkan selama tahun 2025. Realisasi layanan tercapai sebanyak 1 layanan dari target 1 layanan, dengan tingkat capaian 100%.

10. Layanan Sarana Internal

Layanan Sarana Internal diukur dari realisasi pengadaan sarana kantor, dengan realisasi sebanyak 646 unit dari target 283 unit, sehingga tingkat capaian mencapai 228,27%. Capaian tersebut mencerminkan optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

11. Layanan Prasarana Internal

Layanan Prasarana Internal diukur dari realisasi rehabilitasi Gedung Kantor dan/atau Rumah Negara, dengan realisasi sebanyak 52 unit dari target 38 unit, sehingga tingkat capaian mencapai 136,84%. Capaian tersebut mencerminkan optimalnya pelaksanaan rehabilitasi prasarana dalam mendukung keberlangsungan dan kenyamanan lingkungan kerja.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi penggunaan dana tahun 2025 adalah sebesar Rp354.241.397.154,00 atau 88,75% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp399.136.633.000,00 (revisi DIPA ke-13), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Target dan Realisasi Keuangan menurut Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Hasil dan Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengawasan	102.848.974.000	96.314.770.843	93,65
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusdiklatwas	85.722.461.000	77.591.110.178	90,51
Total		188.571.435.000	173.905.881.021	92,22

Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Program

No	Program	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengawasan Pembangunan	102.848.974.000	96.314.770.843	93,65
2	Program Dukungan Manajemen	85.722.461.000	77.591.110.178	90,51
Total		188.571.435.000	173.905.881.021	92,22

Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Keuangan berdasarkan Sumber Dana

No	Program	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rupiah Murni (RM)	55.913.697.000	52.715.350.523	94,28
2	Pinjaman Luar Negeri (STAR)	56.266.642.000	48.043.757.705	85,39
3	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	76.391.096.000,00	72.998.514.693,00	95,56
Total		188.571.435.000	173.905.881.021	92,22

2. Pemanfaatan SDM

Capaian penggunaan SDM tahun 2025 adalah sebesar 103,16%, yaitu realisasi 39.381 OH dari rencana 38.175 OH. Rincian realisasi penggunaan SDM per unit kerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 9 Target dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya Manusia (OH)
Tahun 2025**

No	Program	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengawasan Pembangunan	29.546	30.316	102,61
2	Program Dukungan Manajemen	8.629	9.065	105,05
Total		38.175	39.381	103,16

C. ANALISIS EFISIENSI

Capaian kinerja seluruh program pada tahun 2025 yang sebesar 106,78% didukung dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp173.905.881.021,00 atau 92,22% dari anggaran sebesar Rp188.571.435.000,00, dan SDM sebanyak 39.381 OH atau 103,16% dari rencana sebanyak 38.175 OH.

Dari sisi penggunaan dana, kinerja sasaran program telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian rata-rata *outcome* sebesar 106,78% yang lebih besar dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 92,22%.

Dari sisi pemanfaatan SDM, kinerja sasaran program juga telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian rata-rata *outcome* sebesar 106,78% yang lebih besar dibandingkan dengan capaian pemanfaatan SDM sebesar 103,16%.

Analisis efisiensi untuk masing-masing kinerja sasaran program disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Analisis Efisiensi Kinerja Sasaran Program Pusdiklatwas BPKP Tahun 2025

No	Program	Capaian Input (%)		Capaian Output (%)	Capaian Outcome (%)	Efisiensi Outcome (%)	
		Keuangan	SDM			Keuangan	SDM
1	Program Pengawasan Pembangunan	93,65	102,61	752,61	105,26	efisien	efisien
2	Program Dukungan Manajemen	90,51	105,05	155,04	108,30	efisien	efisien

D. KINERJA LAINNYA TAHUN 2025

Selain kinerja utama yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pusdiklatwas BPKP juga melakukan berbagai kinerja tambahan/kegiatan prioritas yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan utama yang mendukung kinerja tahun 2025

a) Pemutakhiran Peraturan Badan terkait GIA Corpu

BPKP membentuk GIA Corpu pada tahun 2019 melalui Keputusan Kepala BPKP Nomor 209 Tahun 2019 tentang Pembengan Sistem Pembelajaran Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tata Kelola GIA Corpu ini diperkuat melalui Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Goverment Internal Audit Corporate University dan dioperasikan melalui Peraturan Sekretaris Utama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Government Internal Audit Corporate University.

Pada Tahun 2023, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerbitkan Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi sebagai dasar hukum yang memayungi pengembangan Corporate University di Lingkungan instansi pemerintah. Selain itu, peraturan tentang dasar kelembagaan BPKP juga telah mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun

2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Perubahan regulasi baik itu regulasi tentang pengembangan kompetensi terintegrasi dari LAN selaku regulator maupun tugas dan fungsi serta tata kelola kelembagaan BPKP tersebut menjadi dasar perlunya penyesuaian terhadap kebijakan sistem pembelajaran terintegrasi GIA Corpu, baik itu dalam kerangka kerja, tata Kelola, serta pengaturan lainnya agar tetap relevan dengan perkembangan internal dan eksternal.

Pada tahun 2025, Pusdiklatwas melakukan pembaruan dasar hukum GIA Corpu dan hingga Desember 2025 Pusdiklatwas telah melakukan beberapa tahapan antara lain: Kajian Akademis; Benchmark kepada Lembaga Adimistrasi Negara; perumusan naskah peraturan dengan bersinergi dengan Biro Sumber Daya Manusia, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan; permintaan masukan dari Komite Pembelajaran; serta permintaan masukan dan persetujuan (circular letter) kepada para Deputi BPKP.

Penyusunan dasar hukum tersebut akan dilanjutkan di Tahun 2026 untuk tahapan legislative drafting bersama dengan Biro Hukum dan Komunikasi, permintaan persetujuan Kepala, dan harmonisasi peraturan dengan Kementerian Hukum. Peraturan BPKP ini ditargetkan selesai dan disahkan pada Triwulan I Tahun 2026.

b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pusdiklatwas BPKP juga meraih capaian kinerja PNBP yang memuaskan. Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi PNBP senilai Rp81.217.404.093,00 atau mencapai 103,13% dari target penerimaan PNBP sebesar Rp78.753.710.000,00. Keberhasilan ini merupakan upaya seluruh unit kerja BPKP sebagai GIA Corpu.

c) Pemeliharaan Akreditasi ISO 31001:2016 dan ISO 9001:2015

Pusdiklatwas BPKP mampu mempertahankan ISO 37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan ISO 9001:2015 terkait Sistem

Manajemen Mutu dari PT TUV NORD Indonesia (berlaku hingga 6 Agustus 2026).

d) Pelaksanaan peran sebagai *Learning Office* dalam Government Internal Audit Corporate University (GIA Corpu)

Pusdiklatwas BPKP sebagai *Learning Office* berperan secara operasional dan strategis dalam mendukung pelaksanaan *Learning Value Chain* GIA Corpu, mulai dari Analisis Kebutuhan Pembelajaran (*Learning Need Analysis*), desain dan pengembangan (*Design dan Development*), penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran (*Learning Delivery and Deployment*), hingga evaluasi pembelajaran (*Learning Evaluation*). Pada Tahun 2025, Pusdiklatwas memfasilitasi proses tersebut melalui Forum Dewan Pembelajaran (*Learning Council Forum*) untuk penetapan kebijakan pengembangan kompetensi, Forum Komite Pembelajaran (*Learning Committee Forum*) untuk pembahasan kebutuhan dan rencana pembelajaran tahunan serta evaluasinya, serta Forum Mitra Pembelajaran (*Learning Partner Forum*) untuk perumusan desain, pengembangan materi, dan instrumen evaluasi pembelajaran.

e) Pengukuhan SKKNI Pengawasan Intern dan Manajemen Risiko

Pada tahun 2025, Pusdiklatwas telah melaksanakan rangkaian kegiatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Tahapan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengukuhan SKKNI adalah pembentukan kelembagaan SKKNI, penyusunan peta kompetensi, perumusan rancangan SKKNI, verifikasi internal, pra konvensi, verifikasi eksternal oleh Kementerian Ketenagakerjaan, konvensi nasional dan finalisasi. Saat ini SKKNI menunggu proses penetapan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

f) Pemutakhiran Tarif PNBP

Penyesuaian jenis dan tarif PNBP telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 131/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang bersifat Volatil yang berlaku pada BPKP. PMK tersebut telah mengakomodir tarif penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi pimpinan eksekutif.

Saat ini Pusdiklatwas BPKP telah menyusun rancangan usulan perubahan tarif PNPB atas Pelatihan Fungsional Auditor, Pelatihan Teknis Subtansi dan tarif kamar. Rancangan tersebut akan dilakukan pembahasan dengan Biro Keuangan, Pusbin JFA dan para pihak terkait, kemudian diajukan sebagai usulan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2. Penghargaan yang diterima tahun 2025

Selama tahun 2025 Pusdiklatwas BPKP memperoleh berbagai penghargaan, sebagai salah satu bentuk pengakuan di level nasional atas kinerja yang telah dicapai. Rincian penghargaan yang diterima sebagai berikut.

- 1) Pusdiklatwas turut berkontribusi dalam perolehan penghargaan sebagai Corpu Berdampak kategori Kementerian/Lembaga kepada BPKP dari Lembaga Administrasi Negara RI.



Gambar 3. 1 Penghargaan sebagai Corpu Berdampak kategori Kementerian/Lembaga kepada BPKP

- 2) Penghargaan sebagai Lembaga Pelatihan Berprestasi Terbaik II kategori Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Pusat dari Lembaga Administrasi Negara RI.



Gambar 3. 2 Penghargaan Lembaga Pelatihan Berprestasi Terbaik II kategori Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Pusat

- 3) Peraihan Akreditasi A Pelatihan Kedinasan untuk Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar CPNS dari LAN RI.



Gambar 3. 3 Peraihan Akreditasi A Pelatihan Kedinasan dari LAN RI

BAB IV

PENUTUP

A. PENUTUP

Pusdiklatwas BPKP secara konsisten menunjukkan kinerja berkelanjutan sebagai wujud komitmen dalam mendukung keberhasilan BPKP dalam pengawasan keuangan dan pembangunan. Kinerja tersebut tercermin dari kontribusi nyata Pusdiklatwas dalam meningkatkan kualitas hasil dan penyelenggaraan pelatihan SDM Pengawasan serta memperkuat kualitas tata kelola BPKP.

Pada tahun 2025, Pusdiklatwas berhasil mencapai bahkan melampaui target kinerja pada dua sasaran kegiatan dengan rerata capaian sebesar 106,78%. Kedua sasaran kegiatan tersebut diukur melalui tujuh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), di mana enam IKK mencapai atau melebihi 100%, sementara satu IKK masih berada di bawah target. Selain itu, secara keseluruhan rincian *output* juga telah mencapai target yang ditetapkan. Seluruh capaian didukung oleh penggunaan dana dan pemanfaatan SDM yang efisien. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Pusdiklatwas BPKP dalam mewujudkan kinerja yang optimal.

Keberhasilan pencapaian target kinerja secara efisien tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusdiklatwas BPKP. Capaian ini merupakan hasil sinergi dan komitmen seluruh pihak di lingkungan Pusdiklatwas dalam bekerja secara kolaboratif untuk mewujudkan target kinerja. Selain itu, keberhasilan ini juga menjadi bentuk akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan dan pengguna jasa atas kepercayaan yang diberikan kepada Pusdiklatwas BPKP dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM pengawasan yang kompeten.

Namun demikian, capaian tersebut bukanlah titik akhir, melainkan tantangan untuk terus meningkatkan kinerja seiring dengan meningkatnya ekspektasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Pusdiklatwas BPKP

telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk mendorong peningkatan kinerja selanjutnya, antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi SDM pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana dan berkualitas, meliputi analisis kebutuhan pembelajaran, perancangan pelatihan dan materi yang relevan dan mutakhir, penguatan kompetensi pengajar melalui *Training of Trainers* (TOT), serta pengembangan pembelajaran digital dan infrastruktur pelatihan.
2. Memperluas kapasitas dan cakupan pelatihan melalui pengembangan lahan Kampus GIA Corpu di Ciawi serta pemanfaatan Balai Diklat Medan, Denpasar, dan Makassar yang siap digunakan mulai tahun 2026.
3. Memperkuat kolaborasi antara SGO dan Pusdiklatwas dalam pemutakhiran kurikulum serta penyediaan narasumber pelatihan.
4. Meningkatkan kompetensi petugas LO/piket serta mengoptimalkan infrastruktur pelatihan, khususnya kenyamanan mess, ruang kelas, dan layanan konsumsi, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelatihan dengan layanan prima.
5. Meningkatkan tata kelola Pusdiklatwas secara menyeluruh melalui penguatan manajemen aparatur, penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern, optimalisasi pengelolaan anggaran dan aset, serta penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja.

Melalui implementasi strategi yang terarah dan konsisten, Pusdiklatwas BPKP berkomitmen memastikan tercapainya serta meningkatnya target kinerja tahun 2026 secara optimal.

KILAS PERISTIWA



Pusdiklatwas BPKP Kembali Raih Akreditasi A untuk Latsar dan PKP dari LAN RI
06 Nov 2025 | 284



BPKP secara resmi membuka Diklat Fungsional Auditor Ahli Utama APIP Batch 1 Tahun 2025
10 Oct 2025 | 203



BPKP Raih Dua Penghargaan Bergengsi di NFLF 2025
03 Dec 2025 | 471



Penguatan Peran APIP di Lingkungan TNI AD dengan Pelaksanaan Pelatihan OGAE Batch 1 dan Batch 2
03 Nov 2025 | 71



GIA Corpu Gelar Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) Bidang Pengawasan Intern dan Manajemen Risiko Sektor Publik
23 Dec 2025 | 69



Learning Partner Forum & Learning Committee Forum GIA Corpu 2025
19 Sep 2025 | 8206



Learning Council Forum (LCoF) Tahun 2025
30 Dec 2025 | 38



Desain Visual yang menarik menjadi kunci Pelaporan Eksekutif Daerah
26 Feb 2025 | 13535



Pusdiklatwas BPKP Didukung Inspektori Jenderal THAL Tingkatan Peran Auditor Internal yang Profesional dan Bersertifikasi
16 May 2025 | 13231



Tjen Pekerjaan Umum Gandeng Pusdiklatwas BPKP untuk Peningkatan Kompetensi Pengawasan
05 Mar 2025 | 13709



Penandatanganan Pakta Integritas di Pusdiklatwas BPKP



Mengawal Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siswaskeudes
04 Jul 2025 | 82248



BPKP Peduli : GIA Corpu Goes To School
27 May 2025 | 14800



Centre of Excellen, Strategi Peningkatan Kualitas Strategy Delivered BPKP
08 Jul 2025 | 11008



Sertifikasi Certified Government Risk Executive (CGRE): Wujud penguatan Kebijakan MRPN yang lebih efektif.
03 Jun 2025 | 18779



Kepolisian RI Ikuti Pelatihan Manajemen Risiko Masa Kini di Pusdiklatwas BPKP
19 May 2025 | 14542



Pusdiklatwas Mengawal Pengembangan kompetensi di tahun 2025 Dengan Audit Investigatif
06 Jan 2025 | 18252

KINERJA OUTCOME TAHUN 2025

Lampiran 1 / 1 - 2
Laporan Nomor OT.04/PE-S4/DJ.01/2026
Tanggal 12 Januari 2026

No.	Sasaran Kegiatan	IKK	Satuan	Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	Capaian Outcome (%)		
				Tahunan	6		Tahunan		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=adj max 120	10
1	Meningkatnya Kualitas Hasil dan Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengawasan	1.1	Persentase Sumber Daya Manusia Yang Meningkatkan Kompetensinya Setelah Mengikuti Pelatihan	Persen (%)	80	81,47	101,83		■
		1.2	Persentase Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Minimal "Baik"	Persen (%)	92,00	100,00	108,70		■
		RataSub Total					105,26	106,26	■
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	2.1	Nilai Skor Zona Integrasi Unit Kerja	Skor Skala 100	85,00	91,05	107,12		■
		2.2	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	% (Persen)	70,00	100,00	142,86		■
		2.3	Nilai IKPA Unit Kerja	Nilai	95,00	89,64	94,36		■
		2.4	Nilai Pengendalian Intern Paleporan Keuangan Sakter	Predikat	Efektif	100,00	100,00		■
		2.5	Nilai SAKIP Unit Kerja	Predikat	Baik	Memuaskan	120,00	120,00	■
		RataSub Total					112,87	108,30	
		GRAND TOTAL					110,33	106,78	

■ target tahunan sudah tercapai
■ target tahunan belum tercapai

PERHITUNGAN REALISASI OUTPUT DAN ANGGARAN
 TAHUN 2025

No	Kode Program	Rencana Output (RO)	Kerangka Rencana Output				Anggaran			Keterangan
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Plan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	CH	3574.F.A.C. 210 Diklat Penguasaan Auditor PIRP	Orang	836	1256	749,100	8.843.285.000	8.436.739.742	10-33,50%	11
2	CH	3574.F.A.C. 220 Diklat Penguasaan Auditor PIRBP	Orang	2.620	2567	123,05	51.742	7.697.261.000	61,48	
3	CH	3574.F.A.C. 210 Diklat Forum Subseksi PIRP	Orang	2.056	5832	273,93	12.821.863.000	12.001.818.217	93,61	
4	CH	3574.F.A.C. 220 Diklat Forum Subseksi PIRBP	Orang	11.700	13833	119,86	19.993.200.000	19.482.075.610	97,49	
5	CH	3574.F.A.C. 230 Diklat Forum Subseksi STARS	Orang	204	202	99,02	1.639.810.000	1.631.901.739	74,34	
6	CH	3574.F.A.C. 310 Diklat Penguasaan RUI	Orang	2.000	1733	86,65	12.096.650.000	11.843.969.538	97,90	
7	CH	3574.F.A.C. 310 Diklat Penguasaan RUI	Orang	102	107	104,90	1.117.361.000	1.129.320.287	101,04	
8	CH	3574.F.A.C. 320 Diklat Serifikasi Non JPA STIRP	Orang	420	655	156,19	1.117.361.000	748.822.854	66,51	
9	CH	3574.F.A.C. 310 Peminatan Dengan Maksimal (MOOC)	Orang	900	13654	1517,11	225.000.000	211.141.994	93,84	
10	CH	3574.F.A.C. 320 Peminatan Dengan Maksimal (MOOC)	Orang	1.000	2408	240,80	221.000.000	171.744.518	77,71	
11	CH	3574.F.A.C. 310 Seminar - RUI	Orang	5.000	5638	112,76	634.961.000	603.895.360	95,06	
12	CH	3574.F.A.C. 220 Seminar - PIRBP	Orang	661	442	66,87	143.160	215.640.000	76,56	
13	CH	3574.F.A.C. 310 Hesi Penguasaan GUA Corpu	Orang	116	1250	1077,59	8.962.750.000	8.191.995.401	91,40	
14	CH	3574.F.A.C. 320 Hesi Penguasaan GUA Corpu	Orang	80	195	243,75	26.209.964.000	25.217.641.228	96,57	
15	CH	3574.F.A.C. 320 Hesi Penguasaan GUA Corpu	Orang	1	16	1600,00	93.000.000	33.603.851	36,13	
16	CH	3574.F.A.C. 320 Hesi Penguasaan GUA Corpu	Orang	1	16	1600,00	93.000.000	33.603.851	36,13	
17	CH	3574.F.A.C. 320 Hesi Peminatan PIRBP dan Kompetensi PIRBP	Orang	6	6	100,00	14.700.000	7.400.750	50,35	
18	WA	3574.EBA 894 Layanan Perawatan	Layanan, Laporan Rekonstruksi, Unit	1	1	100,00	9.702.160.000	9.512.219.475	98,04	
19	WA	3574.EEB 851 Layanan Servis Internal	Unit, mo, Paket	283	646	228,27	65.749.563.000	57.651.024.312	87,59	
20	WA	3574.EEB 871 Layanan Prasarana Internal	Unit, mo, Paket	38	52	136,84	10.270.708.000	10.227.856.381	99,58	
Total							652.597.188.574	435.600.173.905	881,021	92,22

No	Kode Program	Rencana Output (RO)	Kerangka Rencana Output				Anggaran			Keterangan
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Plan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	CH	3574.F.A.C. 210 Diklat Penguasaan Auditor PIRP	Orang	836	1256	749,100	8.843.285.000	8.436.739.742	10-33,50%	11
2	CH	3574.F.A.C. 220 Diklat Penguasaan Auditor PIRBP	Orang	2.620	2567	123,05	51.742	7.697.261.000	61,48	
3	CH	3574.F.A.C. 210 Diklat Forum Subseksi PIRP	Orang	2.056	5832	273,93	12.821.863.000	12.001.818.217	93,61	
4	CH	3574.F.A.C. 220 Diklat Forum Subseksi PIRBP	Orang	11.700	13833	119,86	19.993.200.000	19.482.075.610	97,49	
5	CH	3574.F.A.C. 230 Diklat Forum Subseksi STARS	Orang	204	202	99,02	1.639.810.000	1.631.901.739	74,34	
6	CH	3574.F.A.C. 310 Diklat Penguasaan RUI	Orang	2.000	1733	86,65	12.096.650.000	11.843.969.538	97,90	
7	CH	3574.F.A.C. 310 Diklat Penguasaan RUI	Orang	102	107	104,90	1.117.361.000	1.129.320.287	101,04	
8	CH	3574.F.A.C. 320 Diklat Serifikasi Non JPA STIRP	Orang	420	655	156,19	1.117.361.000	748.822.854	66,51	
9	CH	3574.F.A.C. 310 Peminatan Dengan Maksimal (MOOC)	Orang	900	13654	1517,11	225.000.000	211.141.994	93,84	
10	CH	3574.F.A.C. 320 Peminatan Dengan Maksimal (MOOC)	Orang	1.000	2408	240,80	221.000.000	171.744.518	77,71	
11	CH	3574.F.A.C. 310 Seminar - RUI	Orang	5.000	5638	112,76	634.961.000	603.895.360	95,06	
12	CH	3574.F.A.C. 220 Seminar - PIRBP	Orang	661	442	66,87	143.160	215.640.000	76,56	
13	CH	3574.F.A.C. 310 Hesi Penguasaan GUA Corpu	Orang	116	1250	1077,59	8.962.750.000	8.191.995.401	91,40	
14	CH	3574.F.A.C. 320 Hesi Penguasaan GUA Corpu	Orang	80	195	243,75	26.209.964.000	25.217.641.228	96,57	
15	CH	3574.F.A.C. 320 Hesi Penguasaan GUA Corpu	Orang	1	16	1600,00	93.000.000	33.603.851	36,13	
16	CH	3574.F.A.C. 320 Hesi Penguasaan GUA Corpu	Orang	1	16	1600,00	93.000.000	33.603.851	36,13	
17	CH	3574.F.A.C. 320 Hesi Peminatan PIRBP dan Kompetensi PIRBP	Orang	6	6	100,00	14.700.000	7.400.750	50,35	
18	WA	3574.EBA 894 Layanan Perawatan	Layanan, Laporan Rekonstruksi, Unit	1	1	100,00	9.702.160.000	9.512.219.475	98,04	
19	WA	3574.EEB 851 Layanan Servis Internal	Unit, mo, Paket	283	646	228,27	65.749.563.000	57.651.024.312	87,59	
20	WA	3574.EEB 871 Layanan Prasarana Internal	Unit, mo, Paket	38	52	136,84	10.270.708.000	10.227.856.381	99,58	
Total							652.597.188.574	435.600.173.905	881,021	92,22

Keterangan:
 1. Pengisian rencana output berdasarkan Satu DUA dan SAKTI
 2. Target Kinerja Rencana Output (Kodon 5) isi berdasarkan data Satu DUA atau dokumen revisi berakut
 3. Realisasi Kinerja Rencana Output (Kodon 9) diisi berdasarkan laporan realisasi fisik output (number data dari bidang keuangan) masing masing unit kegiatan dan aplikasi span (kemungkinan go id (Indikator Kinerja Detail Capaian KPI))
 4. Papan Anggaran (Kodon 8) diisi berdasarkan data Satu DUA atau dokumen revisi berakut
 5. Realisasi Anggaran (Kodon 9) diisi berdasarkan data SAKTI